

Honorarium Harus Direvisi

Prosentase Terlalu Tinggi, Sekda Setuju Dikaji lagi

SEMARANG- Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Jawa Tengah Sri Puryono menanggapi dengan bijak temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Jawa Tengah, terkait honorarium Dewan Komisaris (DK) Bank Jateng yang dianggap terlalu tinggi. Ia menyatakan setuju besaran honorarium tersebut direvisi.

Sri Puryono yang juga menjadi Komisaris Utama (Komut) Bank Jateng secara pribadi menyatakan

BANK JATENG BERMASALAH



be-sa-ran honorarium patut direvisi. "Saya pribadi setuju untuk dilakukan revisi dan rasionalisasi," ungkapnya kepada *Jateng Pos*, kemarin.

Menurutnya, tentang honorarium komisaris yang mencapai 70 persen, merupakan hasil RUPS tahun 2006. Sehingga itu bukan atas kehendaknya secara pribadi.

Karena dalam temuan BPK tersebut dianggap terlalu besar, pihaknya akan



Kita akan kaji aturan yang tidak layak. Kalau aturan mendukung ditinjau ya ditinjau. Barang tidak patut kok dilanjutkan

SRI PURYONO
Sekretaris Daerah Provinsi
Jawa Tengah



mengkaji aturan hasil RUPS 2006 yang dianggap tidak layak tersebut.

"Kita akan kaji aturan yang tidak layak. Kalau aturan mendukung ditinjau, ya ditinjau. Barang tidak patut kok

dilanjutkan," tegasnya.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, Kepala BPK Dr Cris Kuntadi menegaskan bahwa honorarium Dewan Komisaris

Bank Jateng saat ini terlalu tinggi. Sesuai dengan peraturan Bank Indonesia (BI), honorarium Dewan Direksi harusnya 45% dari gaji Direktur Utama (Dirut).

"Yang terjadi di Bank Jateng itu kan mencapai 70%. Ini tidak patut," katanya.

BPK minta, prosentasi honorarium Dewan Komisaris Bank Jateng diperhitungkan kembali. Sehingga memenuhi unsur kepatutan.

Ditambahkannya, memang Peer Group BI harus memperhatikan bank selevel di sekitarnya. Dalam hal ini adalah Bank Jatim, Bank Jabar dan Bank Jakarta.

■ Baca HONORARIUM... hal 7

HONORARIUM

dari hal 1

"Tapi Peer Group itu tidak pada angka nominal. Tapi prosentase. Kalau 70% itu terlalu tinggi," pungkasnya.

Apa yang disampaikan Kepala BPK RI Perwakilan Jateng Cris Kuntadi itu sekaligus mematahkan penjelasan Sekertaris Perusahaan Bank Jateng, Windoyo. Saat dikonfirmasi menyatakan

bahwa BI sebenarnya tidak menyebut angka prosentase honorarium dewan komisaris. Yang disebutkan adalah kepantasan saja.

"BI tidak sebutkan berapa angka prosentase honorarium komisaris. Yang disebutkan hanya kepantasan saja," ungkapnya.

Untuk menentukan kepantasan itu, bisa melaku-

kan studi banding dengan bank lain, misalnya Bank Jatim atau Bank Jabar.

"Berdasarkan studi banding itu, honor komisaris di Bank Jateng ditentukan 70% dari gaji direktur utama yang nilainya Rp 80 juta," katanya. Sehingga honor Komisaris Utama Bank Jateng sebesar Rp 56 Juta. (udi/muz)